

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Adjie, Habib, 2011, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Algra, N.E, dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, Binacipta, Jakarta.
- Arba, H.M, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiono, Herlien, 2012, *Peluang dan Hambatan Implementasi Cyber Notary di Indonesia, Seminar Nasional : Eksistensi Notaris dalam Aktivitas Cyber Notary*, Bandung.
- Boediarto, M. Ali, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia*, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., Amerika Serikat.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Effendie, Bachtiar, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Pengaturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Himawan, Muammar, 2004, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- HS, Salim, 2009, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim dan Ellis Septiana Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta.
- Kansil, C.S.T,dkk, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2007, *Pengantar Teori Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mirwati, Yulia, 2015, *Konflik Tanah Ulayat*, Andalas University Press, Padang.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Putro, Widodo Dwi, 2016, *Penjelasan Hukum : Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*, LeIP, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1988, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bale, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso, Urip, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soeroso, R, 2011, *Perjanjian Dibawah Tangan : Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R, 2015, *Hukum Pembuktian*, PT Balai Pustaka, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2017, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2017, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, 2003, *Jual Beli*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan :

UUD 1945

KUH Perdata

KUH Pidana

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

PP No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

PP No. 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan

Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

PMPA No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah

Perkaban No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perkaban No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Perkaban No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Perkaban No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

1. Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, 2019,
<https://pesselkab.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 13 April 2019 pukul
10:45 WIB.

